

NOTULA WEBINAR
Transparansi *Beneficial Ownership*
Bangun Iklim Usaha yang Transparan

1. Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis, 16 September 2021
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Via *Zoom Meeting*

2. Pembukaan

- Bapak Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas)

- Jika data BO tidak dibuka, maka akan ada penyalahgunaan korporasi untuk tindak pidana terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Safe haven countries juga sudah menurun karena ada upaya bersama dalam membuka data BO. Tapi baru 22,36% korporasi di Indonesia yang membuka data BO. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terkait BO.
- Sebanyak 91 persen pemimpin bisnis dunia menganggap keterbukaan BO penting untuk mengetahui kegiatan yang akan dilakukan mitra/lawan bisnis. BO juga linear dengan kenaikan *corruption perception index* secara signifikan di tahun 2020. Berdasarkan pentingnya BO, kebijakan transparansi data diadopsi oleh 33 negara dari sebelumnya hanya 16 negara.
- Di tingkat nasional, berbagai regulasi telah dikeluarkan dan BO kemudian menjadi aksi dalam Stranas Pencegahan Korupsi. Di tingkat global yang mana Indonesia berperan aktif, BO juga menjadi rekomendasi bersama (misalnya dalam Open Government Partnership, Anti-Corruption Working Group, G20, Financial Action Task Force).
- Perlu adanya penguatan aksi BO misalnya penguatan RUU Badan Usaha, penguatan regulasi untuk deklarasi data BO, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, K/L, dan notaris, serta peningkatan strategi komunikasi untuk memahami data BO dan pemanfaatan data BO.

3. Catatan Diskusi

- Bapak Slamet Soedarsono, Deputi Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas
 - Aksi *Beneficial Ownership* (BO) masuk ke dalam Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2021-

2022. Capaian Aksi BO selama semester I masih moderat yakni sekitar 10%.

- Berdasarkan Perpres 13/2018, definisi *Beneficial Owner* (pemilik manfaat) adalah orang yang dapat: (1) menunjuk atau memberhentikan pengurus korporasi, (2) mengendalikan korporasi, (3) menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, dan (4) pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi
- Urgensi Transparansi Data BO adalah: Mencegah penyalahgunaan korporasi sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan korupsi serta memaksimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana; Meningkatkan kredibilitas dan menciptakan iklim investasi yang baik; Pemenuhan komitmen Indonesia di dunia internasional; Menciptakan keadilan dan meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah
- Beberapa studi hubungan korupsi dan investasi menunjukkan bahwa investasi terhambat karena korupsi mendorong inefisiensi aktivitas investasi di Indonesia. Misalnya, hasil estimasi data panel di negara ASEAN-5 periode 1995-2015 menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara korupsi dan PDB terhadap FDI. Negara yang tidak terlalu korup dan ukuran pasar yang lebih besar akan menarik lebih banyak aliran masuk (*inflow*) FDI.
- Efisiensi Investasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga dan semakin turun dari waktu ke waktu karena biaya investasi di Indonesia mahal. Salah satunya disebabkan oleh adanya korupsi. Oleh karena itu, Aksi Keterbukaan Data BO didorong untuk menekan kasus korupsi yang ada.
- Capaian Aksi BO di antaranya: (1) Kementerian Hukum dan HAM telah mengembangkan Sistem Basis Data Beneficial Ownership pada AHU Online. Jumlah Korporasi yang telah melaporkan BO per 31 Agustus 2021 tercatat sebanyak 515.783 korporasi (22,36%) dari jumlah korporasi sebanyak 2.306.908 korporasi; (2) Stranas PK dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia telah menyusun kajian keterbukaan data Beneficial Ownership bagi Publik, Pihak Pelapor, Instansi Peminta, dan Instansi Berwenang; (3) Stranas PK bekerja sama dengan Auriga mengembangkan fitur visualisasi

jejaring data BO untuk melihat keterhubungan korporasi dan BO-nya.

- Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengakselerasi Aksi BO di antaranya (1) Penguatan regulasi melalui penyusunan RUU Badan Usaha, RUU Perampasan Aset, dan Revisi UU Jabatan Notaris (2) Strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman pentingnya transparansi BO dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif (3) Dukungan sistem informasi Beneficial Ownership yang terintegrasi (4) Dukungan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, lembaga profesi seperti notaris, dan masyarakat
- Bapak Cahyo Muzar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - Indonesia saat ini berstatus observer dalam FATF dan sedang berusaha menjadi anggota FATF. Evaluasi keanggotaan ini akan dilakukan di bulan Oktober 2021. Untuk menjadi anggota, Indonesia harus mendapat penilaian Largely Compliant (LC) pada minimal 33 rekomendasi dari 40 rekomendasi. Salah satu penilaian yang belum mendapatkan LC adalah transparansi terkait BO. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas tindak pencucian uang dan pendanaan korupsi perlu dikuatkan agar menguatkan posisi Indonesia untuk masuk dalam FATF. Upaya pencegahan korupsi salah satunya dilakuakn dengan integrasi basis data BO.
 - Pada awalnya, BO adalah konsep yang ada dalam *common law system*. Dalam sistem tersebut, pemilik manfaat dapat memberi mandat pada *nominee* untuk mengatur korporasi. Hal ini dapat menutup keberadaan *ultimate BO* karena adanya *trust company* yang kemudian mengelola aset BO yang manfaatnya tetap kembali ke *Beneficial Owner* tersebut. Dengan kata lain, kepemilikan dibagi menjadi 2 kategori yakni *legal owner (nominee)* dan *beneficial owner*.
 - Di Indonesia, UU no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan adanya pelarangan company yang dimiliki *nominee* di Indonesia.
 - Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan korporasi untuk mendeklarasikan data BO baik melalui pengurus, notaris, atau basis data Kementerian/Lembaga. Perpres 13 tahun 2018 juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan MoU dengan 5 Kementerian untuk mengintegrasikan data BO yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan,

Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN. Berbagai korporasi khususnya PT kemudian harus mendaftarkan data BO untuk mendapatkan izin usaha.

- Dua hal yang akan dilakukan (1) Bagi korporasi berbentuk PT, kepemilikan saham di atas 25% akan otomatis masuk dalam daftar BO. (2) Merampungkan integrasi basis data sehingga ada satu data BO yang terpusat.
- Bapak Achmad Idrus, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
 - Setelah adanya UU Cipta Kerja, banyak perbaikan yang dilakukan dalam proses perizinan usaha, misalnya seluruh perizinan berusaha dapat diurus melalui OSS dan ada sistem pengawasan untuk usaha untuk pengecekan kepatuhan.
 - Paradigma perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko. Artinya perizinan berusaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usaha dan tingkat risiko ini menentukan jenis perizinan berusaha. Semakin rendah risiko usahanya, maka semakin mudah dan cepat prosesnya.
 - Keterbukaan Data BO merupakan isu yang sangat penting. Data BO dapat mengungkap kasus terkait banyaknya korporasi yang sudah diberi izin tapi proyek tidak berjalan. Selain itu *tax holiday* juga tidak digunakan. Hal ini dapat ditelaah ketika data BO terungkap karena bisa jadi ada masalah di tingkat kepemilikan.
 - Kementerian Investasi/BKPM akan melakukan (1) merumuskan dan menetapkan regulasi terkait penerapan beneficial ownership bagi Pelaku Usaha (2) sosialisasi untuk menjelaskan adanya penerapan pemilik manfaat.
- Bapak Yanuar Nugroho, Akademisi
 - Menurut Bank Dunia (2021) ada beberapa parameter *ease of doing business* (EoDB) seperti izin konstruksi, perlindungan investor, pembayaran pajak, dan pemberian kredit.
 - Kesulitan untuk melakukan bisnis di Indonesia antara lain: korupsi, lemahnya sistem hukum, ketidakstabilan sosial. Butuh banyak usaha untuk investasi di Indonesia daripada negara lain. Selain itu, ada resiko investasi di Indonesia yakni: korupsi, demonstrasi, birokrasi, infrastruktur, bencana alam, dan lainnya.
 - Keterbukaan data BO menjadi penting karena ketidakjelasan memungkinkan banyak aktivitas ilegal, seperti penghindaran pajak (tax

evasion), korupsi (corruption), pencucian uang (money laundering), dan pembiayaan terorisme (financing of terrorism) yang dilakukan di luar jangkauan wewenang otoritas hukum. Transparansi data BO mencegah adanya pencucian uang

- Transparansi Data BO tidak menghambat EoDB (*Ease of Doing Business*) karena Transparansi BO memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan TPPU, misalnya dengan mencegah penyalahgunaan sebagai tempat menyimpan hasil tindak pidana (safe haven for illicit/corrupt assets); membantu penyidikan TPPU dalam menelusuri aset hasil tindak pidana; memaksimalkan pemulihan aset.
- Selain itu, banyak manfaat keterbukaan BO untuk ekonomi dan investasi, seperti: mendorong integritas berusaha; meningkatkan transparansi sektor swasta (legitimate business); meningkatkan kredibilitas korporasi; melindungi investor dan pelaku usaha/korporasi; menciptakan iklim investasi yang baik sehingga mendorong peningkatan investasi LN.
- Basis data BO yang terintegrasi mutlak untuk dikembangkan. Selain itu, deklarasi BO merupakan wujud keterbukaan pemerintah.
- Bapak Arsjad Rasjid, Ketua Umum KADIN Indonesia
 - Keterbukaan data BO telah didorong oleh beberapa negara, misalnya Inggris telah menerapkan akses publik untuk Beneficiary Ownership atau pemilik manfaat dari korporasi sejak 2016. Dan dalam kurun waktu dua tahun, daftar ini sudah diakses lebih dari dua miliar kali oleh masyarakat masyarakat.
 - Ada beberapa keuntungan membuka data BO, yakni (1) tidak terlihat menghindari pajak (2) terhindar dari tuduhan pencucian uang (3) mendukung pemberantasan korupsi dan terorisme (4) menunjukkan komitmen transparansi.
 - Upaya identifikasi non-formal beneficial owner: (a) mencari surat kuasa atau perjanjian tersembunyi (b) keterangan saksi yang mengetahui keseharian perusahaan (c) komunikasi antara BO dan manajemen korporasi (d) melihat perlakuan/fasilitas istimewa manajemen terhadap BO tersebut (e) melihat transaksi keuangan BO tersebut.
- Bapak Santun, Ditjen AHU
 - Pemilik manfaat koperasi dan yayasan masih dikaji. Ada beberapa komponen yang menjadi indikator pengisian BO bagi Koperasi dan Yayasan yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Dokumentasi

Zoom Webinar

Recording

TRANSPARANSI BENEFICIAL OWNERSHIP BANGUN IKLIM USAHA YANG TRANSPARAN

Pencapaian Aksi 1: Jumlah Basis Data BO bagi Publik

Kementerian Hukum dan HAM telah mengembangkan Sistem Basis Data *Beneficial Ownership* pada AHU Online. Jumlah Korporasi yang telah melaporkan BO per 31 Agustus 2021 tercatat sebanyak **515.783 korporasi (22,36%)** dari jumlah korporasi sebanyak **2.306.908 korporasi**.

Tipe Korporasi	Persentase
Perseroan Terbatas	36,85%
CV	54,80%
Yayasan	7,00%
Koperasi	3,18%
Persekutuan Perdata	40,78%
Firma	22,90%

*) termasuk korporasi yang dormant/tidak aktif

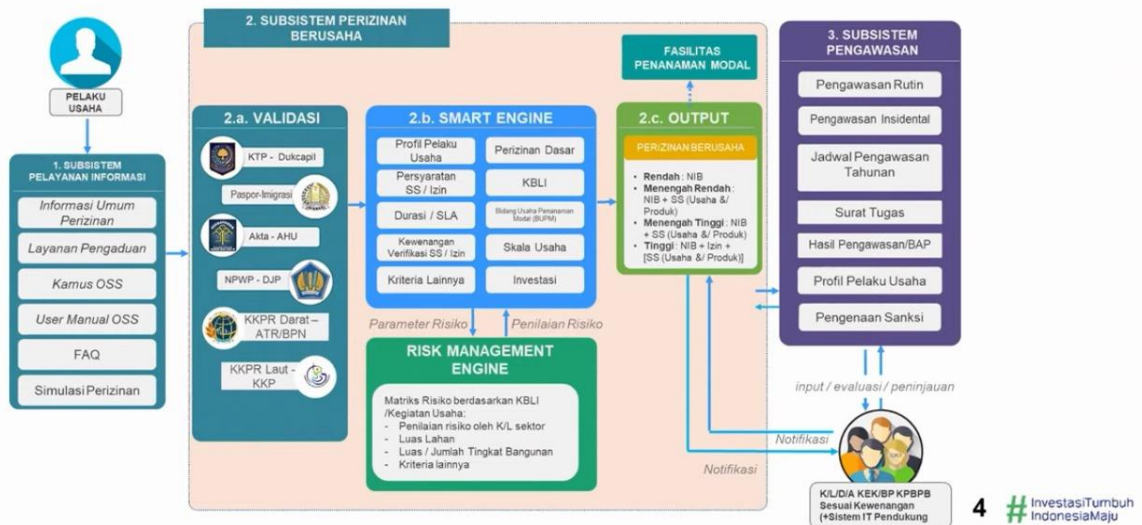
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

STRANAS PK - STUDIO UTAMA

Chat Raise Hand Q&A

ENG 9:37 16/09/2021

Alur Sistem OSS Berbasis Risiko



Zoom Webinar You are viewing Yanuar Nugroho's screen View Options

Recording

Jadi, apakah transparansi BO menghambat EoDB? Tidak!

Bahkan ...

- **91% pemimpin bisnis** menganggap **penting** untuk mengetahui *beneficial owners* dari entitas yang melakukan hubungan bisnis dengan mereka (EY's Global Fraud Survey, 2016)
- Lembaga pemeringkat risiko *Standard & Poor's*, *Moody's*, dan *Fitch* menggunakan **transparansi korporasi sebagai kriteria** penilaian mereka.

Selain itu ...

- **Transparansi BO memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan TPPU**
 - Mencegah penyalahgunaan sebagai tempat menyimpan hasil tindak pidana (*safe haven for illicit/corrupt assets*)
 - Membantu penyidikan TPPU dalam menelusuri aset hasil tindak pidana
 - Memaksimalkan pemulihan aset
- **Transparansi BO justru berkontribusi positif pada ekonomi dan investasi**
 - Mendorong integritas berusaha
 - Meningkatkan transparansi sektor swasta (*legitimate business*)
 - Meningkatkan kredibilitas korporasi
 - Melindungi investor dan pelaku usaha/korporasi
 - Menciptakan iklim investasi yang baik sehingga mendorong peningkatan investasi LN

Audio Settings Chat Raise Hand Q&A Leave

Never submit passwords through Google Forms.

Type here to search

ENG US 10:28 16/09/2021

Jadi, apakah transparansi BO menghambat EoDB? Tidak!

Rahmat

- 91% pemimpin bisnis menganggap penting untuk mengetahui *beneficial owners* dari entitas yang melakukan hubungan bisnis dengan mereka (EY's Global Fraud Survey, 2016)
- Lembaga pemeringkat risiko *Standard & Poor's*, *Moody's*, dan *Fitch* menggunakan **transparansi korporasi sebagai kriteria** penilaian mereka.

Selain itu ...

- **Transparansi BO memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan TPPU**
 - Mencegah penyalahgunaan sebagai tempat menyimpan hasil tindak pidana (*safe haven for illicit/corrupt assets*)
 - Membantu penyidikan TPPU dalam menelusuri aset hasil tindak pidana
 - Memaksimalkan pemulihan aset
- **Transparansi BO justru berkontribusi positif pada ekonomi dan investasi**
 - Mendorong integritas berusaha
 - Meningkatkan transparansi sektor swasta (*legitimate business*)
 - Meningkatkan kredibilitas korporasi
 - Melindungi investor dan pelaku usaha/korporasi
 - Menciptakan iklim investasi yang baik sehingga mendorong peningkatan investasi LN

STRANAS PK - STUDIO UTAMA